

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN DAN PENDAPATAN NELAYAN TONDA DI KOTA PADANG

Tony Kurniawan, Alfian Zein, Junaidi

Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Universitas Bung Hatta

E-mail : tonykurniawan068@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the fishing profit sharing system and the income of ships' owners and the ships' crews of tonda in Padang. The research was conducted in May, 2014 – November, 2015. Samples are fishing fishermen of tonda who are 90 ships' crews and 75 ships' owners. The choosing of respondents was done purposively. Research findings showed that gross income was Rp. 20.525.533, it's reduced by operational fee as much as Rp. 11.651.533, so that it got Rp. 8.901.000, profit sharing for the ships' owners was 50% (Rp. 4.450.500), and for the crews was 50% with the details; 20% for the captains (Rp. 1.780.200), for the working crews was 30% (Rp. 2.670.300), it is divided by three parts for each crews (Rp. 890.011). Profit sharing of fishing tools of tonda, in Padang estuaries, already fulfills the rules No. 16 of 1964. That is the cost and safety warranty of the fishermen are certified together by the ships' owners and the ships' crews, the maintenance and repairing costs are certified by the ships' owners, the net incomes are divided by 50% for the ships' owners and 50% for the crews/fishermen.

Keywords : *Profit sharing system, Incomes, Fishermen of Tonda*

Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang sangat besar yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera, memiliki panjang pantai 375 km² mulai dari Kabupaten Pasaman Barat di Utara sampai Kabupaten Pesisir Selatan di Selatan serta 2.420 km² jika termasuk pantai di kepulauan Mentawai. Khusus potensi ikan dari potensi sumberdaya ikan sebanyak 340.390 ton produksi ikan yang tergarap baru sekitar 30% dari potensi, artinya masih mungkin untuk pengembangan

terutama di perairan lepas pantai sampai kepulauan Mentawai maupun ZEE (**Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang, 2012**).

Hal ini merupakan potensi yang besar untuk dikelola dan dikembangkan, khusus untuk alat tangkap pancing tonda yang berada di Muaro Kota Padang yang berjumlah 112 unit Kapal Motor (KM) dan 14 unit Perahu Motor Tempel (PMT) yang berukuran 5-10 GT, produksi ikan hasil tangkapannya yang didaratkan di TPI Muaro Kota Padang dengan produksi ikan paling banyak di

hasilkan pada tahun 2012 dengan produksi terbesar 19.590,600 ton, dari tahun 2003 terjadi peningkatan hasil tangkapan hingga tahun 2012 (**Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang, 2012**).

Hasil penelitian dari **Sudaryanto (2009)** adalah praktek bagi hasil perikanan di kalangan nelayan pandangan Wetan berdasarkan data lapangannya mengemukakan bagi kapal kecil mengadopsi pola bagi hasil itu dari nelayan lain, seperti Tegal, Pekalongan, dan Batang. Dalam UU No. 16 Tahun 1964, yang menyatakan bahwa pada perikanan laut jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% dari hasil bersih.

Di tengah pencarian rasa adil dalam pola bagi hasil antara pemilik dengan penggarap, sistem bagi hasil alternatif temuan **PKSPL (2002)** dan **Muhartono (2004)**, nampaknya bisa dijadikan rujukan. Mengingat, sistem bagi hasil alternatif memasukkan biaya penyusutan. Hadirnya sistem bagi hasil alternatif didasarkan pada adanya ketidakadilan dalam proses pembagian hasil secara adat. Bagi hasil alternatif memakai asumsi bahwa setiap usaha memiliki biaya penyusutan tiap tahun dan pada tahun ke-n biaya investasi akan tertutupi sesuai dengan waktu balik modal (*payback period*), sehingga setelah tahun ke-n diharapkan pendapatan nelayan akan meningkat seiring dengan berubahnya

proporsi bagi hasil. Waktu yang dibutuhkan untuk menutupi biaya investasi sangat ditentukan oleh jumlah dan harga hasil tangkapan. Selain itu ditentukan juga oleh biaya variabel yang dikeluarkan tiap melaut.

Pemerintah sejak lama telah berusaha mencegah terjadinya kesenjangan pendapatan antar pelaku usaha perikanan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (**UUBHP No. 16/1964**) yang sampai saat ini masih berlaku.

Agar dapat melakukan upaya-upaya di atas, maka perlu diteliti bagaimana pembagian hasil usaha perikanan laut antara pemilik modal sebagai nelayan juragan (majikan) yang memiliki perahu/kapal dan alat penangkapannya dengan nelayan penggarap, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Batang Arau, Muara Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kodya Padang, Provinsi Sumatera Barat, karena merupakan tempat pendaratan ikan pelagis besar yang cukup besar dan memiliki sumber ekonomi yang sangat tinggi. Apakah pembagian hasil antara pemilik kapal dan penggarap kapal/ABK sesuai dengan Undang-undang yang sudah ada, agar tidak adanya kesenjangan antara hasil antara pemilik kapal dan penggarap/ABK. Untuk itu Penulis berkeinginan melakukan penelitian tentang “Analisa Sistem Bagi

Hasil Perikanan Dan Pendapatan Nelayan Tonda di Kota Padang“.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Analisis sistem bagi hasil dan pendapatan nelayan pemilik kapal perikanan tonda di Kota Padang.
2. Analisis sistem bagi hasil dan pendapatan nelayan ABK perikanan tonda di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada Mei 2014-November 2015. Penelitian ini berkonsentrasi pada nelayan tonda di pelabuhan Muaro Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Batang Arau Desa Muaro Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.

Metode Penelitian

Penentuan responden ditentukan secara sengaja. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara langsung, 75 responden yang meliputi nelayan pemilik kapal tonda, 90 ABK nelayan tonda yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun, berdasarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disusun sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Daerah Penelitian

Kota Padang sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Barat terletak pada dataran rendah di pantai barat Pulau Sumatera. Sebagai kota pantai, Kota Padang terdiri atas dataran rendah yang terletak pada ketinggian 0 – 10 m di atas permukaan laut. Secara umum, Kota Padang terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0-1.853 m di atas permukaan laut. Daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan, sedangkan daerah lainnya terletak pada dataran tinggi, yaitu sebelah selatan dan timur.

Keadaan Umum Masyarakat Nelayan Perikanan Tonda di Muara Kota Padang Kecamatan Padang Selatan Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan di Kecamatan Padang Selatan, khususnya masyarakat di Muara Kota Padang mayoritas masyarakatnya pergi melaut, (lihat tabel 1)

Tabel 1. Jumlah Masyarakat Nelayan Tonda yang dalam Kesehariannya Bekerja Melaut Tahun 2014

No.	Kecamatan	Penuh	Sambilan	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Bungus Teluk Kabung	1559	143	1702
2.	Lubuk Kilangan	-	-	-
3.	Lubuk Begalung	978	109	1087
4.	Padang Selatan *	878	95	973
5.	Padang Timur	-	-	-
6.	Padang Barat	385	29	414
7.	Padang Utara	634	47	681
8.	Nanggalo	26	7	33
9.	Kuranji	-	-	-

10.	Pauh	-	-	-
11.	Koto Tengah	1910	125	2035

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang tahun 2014

Ket: *) Kecamatan Lokasi Penelitian

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Padang Selatan masyarakat nelayan perikanan Kota Padang yang melaut penuh sebanyak 878 orang, dan nelayan sambilan sebanyak 95 orang.

Perikanan Tonda di Kota Padang

Deskripsi Armada

Kapal tonda yang umumnya digunakan nelayan Sumatera Barat berukuran 5-20 GT, tiap kapal tonda biasanya terdiri dari 4 orang Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nakhoda kapal yang dalam bahasa nelayan Padang disebut “Tungganai”. Tungganai disamping nakhoda juga berperan sebagai *fishing* master.

Kapal tonda yang digunakan rata-rata memiliki ukuran panjang keseluruhan kapal Length Over All (LOA) = 12,5 m Lebar (B) = 3 m, Tinggi (D) = 1,20 m. Menggunakan mesin Yanmar 30 - 33 PK. Rata-rata nelayan tonda di Muara Padang membeli mesin kapal yang seken yang telah berumur 50-60 tahun.

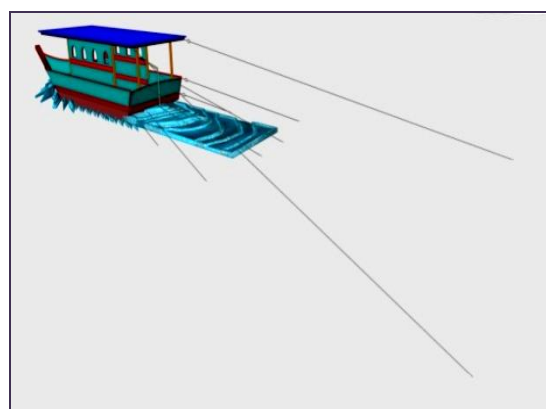
Deskripsi Alat Tangkap Pancing Tonda

Alat tangkap pancing tonda dengan menggunakan alat berjenis mata pancing

(MP), tali pancing (TP), nylon, batu, dan umpan/bulu atau umpan buatan. Dan jumlah harga alat tangkap dari keseluruhan responden nelayan di Kota Padang yaitu Rp. 230.000.000,- dengan rata-rata harga alat tangkap Rp. 3.066.667,- per unit.

Pancing tonda merupakan alat tangkap yang sangat populer di perairan Sumatera Barat. Nelayan tonda tersebar pada 6 (*enam*) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Kabupaten Mentawai. Pancing tonda menggunakan mata pancing nomor 3, 8 dan 9 dan (*Nylon*) tali senar/damil nomor 70-80 dan nylon nomor 800 ,sedangkan (*Rewang*) kayu pinggang dengan panjang 10-12 meter.

Gambar Kapal tonda saat setting dalam penangkapan ikan

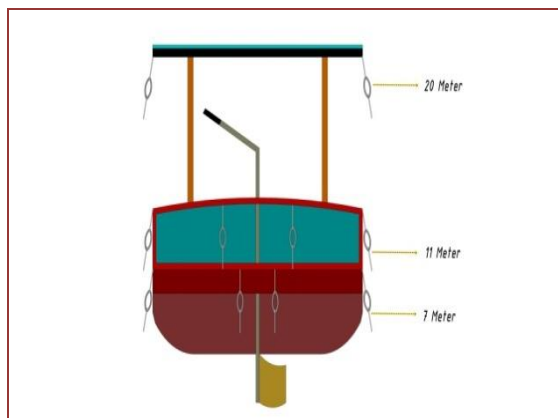


Gambar 1. Kapal Tonda

Berdasarkan gambar 1 adalah para nelayan mencari dimana posisi ikan berada diatas permukaan laut dan disaat posisi kapal sedang jalan dan mata pancing

tonda diturunkan sewaktu kapal berjalan setiap anggota anak buah kapal (ABK) menurunkan satu persatu mata pancing yang ada. Dan disaat mata pancing dimakan ikan, maka satu orang ABK ditugaskan untuk menarik mata pancing yang dimakan ikan dan satu orang ABK lagi menurunkan tali dengan menggunakan rewang yang berfungsi supaya tali tidak kusut. Setelah hasil tangkapan didapat, maka ABK yang lainnya memasukkan ikan kedalam peti es yang terletak didepan kapal.

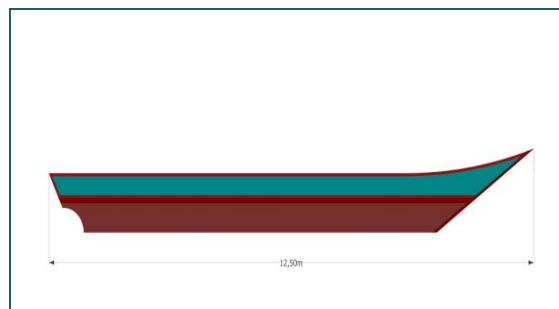
Gambar letak tali pancing tonda tampak dari belakang kapal



Gambar 2. Letak Tali Pancing Tonda

Serta bisa dilihat di gambar 2 posisi mata pancing ada 10 titik. Dua mata pancing di atap (kiri dan kanan), 4 mata pancing di atas pinggang kapal dan 4 mata pancing lagi di garis syarat muat air atau di pinggang kapal.

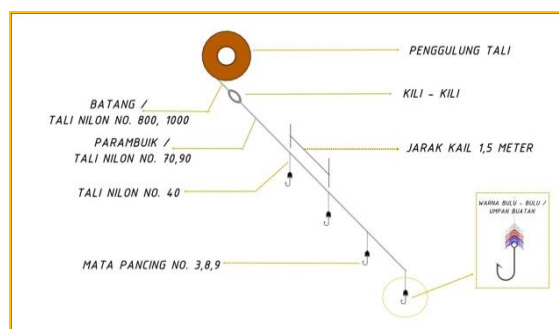
Gambar ukuran keseluruhan panjang kapal tonda/LOA (*length over all*)



Gambar 3. Ukuran Kapal Tonda

Pada gambar 3 bisa dilihat bahwa biasanya ukuran panjang keseluruhan kapal (*length over all/LOA*) adalah 12,50 meter dan kapal biasanya terbuat dari bahan kayu jati. Secara definisi LOA adalah panjang kapal yang diukur dari haluan kapal terdepan sampai buritan kapal paling belakang. Merupakan ukuran utama yang diperlukan dalam kaitannya dengan panjang dermaga, muatan, semakin panjang LOA semakin besar kapal bearti semakin besar daya angkut kapal tersebut. Sedangkan daya angkut/muatan kapal tonda di Muaro Kota Padang sebesar 10-12 ton.

Gambar ukuran alat tangkap pancing tonda



Gambar 4. Alat Tangkap Pancing Tonda

Pada gambar 4 memperlihatkan bentuk mata pancing tonda dengan rincian penggulung tali yang terbuat dari jenis kayu jati, tali nilon yang biasa disebut “batang” dengan nomor nilon 800-1000, pada tali nilon disambungkan dengan kili-kili yang terbuat dari besi putih atau timah. Tali nilon yang berukuran nomor 70-90 diikat setelah batang dan dibawah kili-kili. Ditali nomor 70-90 diikat satu persatu tali pancing (*parambuik*) yang berukuran nomor 40-100 dan itu juga tergantung dengan jenis ikan yang ingin ditangkap. Dan mata pancing diikatkan di tali pancing dengan mata pancing nomor 3,8 dan 9 serta dengan jarak mata kail 30-60 cm antar mata pancing.

Untuk umpan dipakai bulu-bulu yang terbuat dari plastik dengan berbagai macam warna seperti, putih, merah, biru, kuning dan lain-lain. Untuk parambuik bisa mencapai 50-100 mata pancing. Biasanya untuk mata pancing ini jenis ikan yang ditangkap yaitu ikan seperti ikan tongkol, anak tuna, ikan gembung atau gambolo serta jenis ikan di atas permukaan laut (ikan pelagis).

Metode Operasi Penangkapan dan Daerah Operasi Penangkapan

Metode operasi penangkapan ikan dengan kapal tonda dioperasikan siang hari dengan cara berlayar ke daerah penangkapan ikan/DPI (*fishing ground*).

Malam hari nelayan umumnya memperbaiki tali pancing dan istirahat dengan membiarkan kapal terapung tanpa menyalakan mesin. Lama operasi penangkapan berkisar 15-20 hari setiap trip.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 meliputi perairan Samudera Hindia barat Sumatera dan selat sunda. Daerahnya mencakup perairan di sebelah Barat Sumatera. Secara oseonografis wilayah perairan Barat Sumatera merupakan perairan yang subur. Masa air dari beberapa perairan yang membawa nutrient tinggi saling bertemu di Samudera Hindia dan bisa menyebabkan *upwelling*. Nelayan tonda Kota Padang hampir keseluruhannya melakukan penangkapan ikan/DPI (*Fishing ground*) di wilayah Perairan Mentawai.

Hasil Tangkapan

Berdasarkan hasil data primer bahwa jenis ikan hasil tangkapan para nelayan kapal tonda adalah; cakalang (*Katsuwonus pelamis*) sebanyak 16250 ekor, tongkol (*Euthynus allecterates*) sebanyak 17050 ekor, lemadang (*Crophynea hippurus*) sebanyak 2870 ekor, tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*) sebanyak 3550 ekor, tongkol abu-abu (*Thunnus tonggol*) sebanyak 18250 ekor, kakap (*Lutjanus apolus*) sebanyak 3020 ekor dan jenaha (*Lutjanus*

synagris) sebanyak 900 ekor. Jenis ikan yang banyak diperoleh oleh pada masyarakat nelayan kapal tonda Muara Kota Padang pada tahun 2014 adalah jenis ikan tongkol abu-abu dengan jumlah 18250 ekor ikan dengan rata-rata mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.112.00,-.

Sedangkan pada penelitian di PPN Palabuhan ratu oleh **Wijaya (2012)** Mandidihang merupakan ikan dominan yang tertangkap dengan pancing tonda, dimana teknik pengoperasiannya dengan menggunakan alat bantu dirigen seperti rawai tunggal. Selama penelitiannya Mandidihang tertangkap sebesar 90.78 ton, selanjutnya disusul dengan cakalang 62.59 ton, ikan tuna mata besar dan setuhuk loreng menempati urutan yang ketiga dan keempat dengan berturut-turut 38.51 ton dan 15.34 ton.

Pendapatan

Nilai Investasi

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. (**Sadono, 1997**).

Berdasarkan hasil data primer bahwa rata-rata biaya investasi yang dikeluarkan nelayan tonda sebesar Rp. 108.206.667,-. Jenis investasi yang terbesar yang dikeluarkan nelayan tonda adalah pada body kapal rata-rata sebesar Rp. 63.640.000,- dan yang terkecil adalah alat tangkap sebesar Rp. 3.206.667,-. Sedangkan rata-rata biaya dalam usaha penangkapan kapal pancing tonda yang dikeluarkan untuk jenis investasi mesin sebesar Rp. 41.360.000,-. Jika ditotalkan semuanya, investasi usaha penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pancing tonda dari semua responden didapatkan sebesar Rp. 8.115.500,- atau rata-rata investasi usaha mereka adalah Rp. 108.206.667,-, mengenai pembelian mesin kapal, mereka mengeluarkan biaya dengan harga yang berbeda-beda, lebih banyak membeli mesin seken daripada mesin baru.

Penjualan (*Revenue*)

Pendapatan merupakan hasil penerimaan dikurangi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Rata-rata hasil penerimaan usaha perikanan tonda di Muara Kota Padang dengan rata-rata Rp. 20.552.533,-, sedangkan biaya operasional per trip yang rata-rata sebesar Rp. 11.651.533,-, adapun keuntungan yang diperoleh nelayan tonda di Muara Kota Padang per trip yaitu rata-rata sebesar Rp. 8.901.000,-. Demikian

perolehan pendapatan selanjutnya akan didistribusikan berdasarkan hasil bersih untuk bagi hasil perikanan laut.

Biaya Operasional

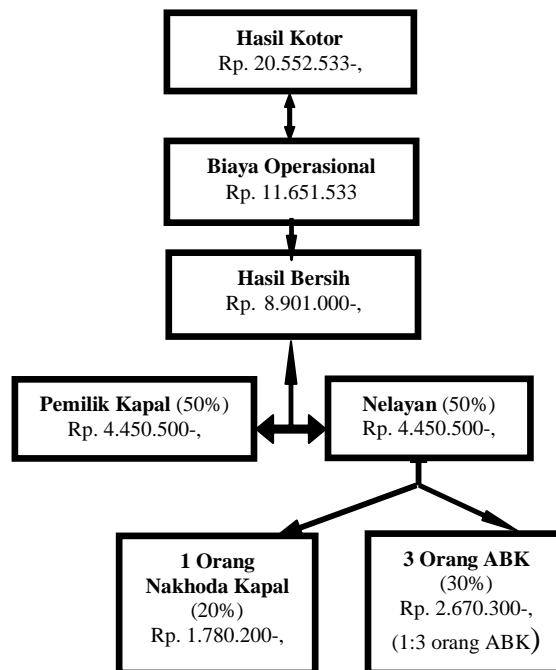
Berdasarkan hasil data primer pada hasil biaya operasional masyarakat nelayan Muara Kota Padang pada saat melaut yaitu sebesar Rp. 867.360.000,- per trip dengan rata-rata Rp. 11.564.800,-, sedangkan pertahunnya sebesar Rp. 15.612.480.000,- per tahun dengan rata-rata 208.166.400,- per tahun. Yang terdiri dari biaya solar sebesar Rp. 421.500.000,-, biaya rokok Rp. 75.000.000,-, biaya es balok Rp. 76.860.000,-, biaya ransum Rp. 294.000.000,-.

Bagi Hasil Nelayan Tonda

Sistem bagi hasil untuk perikanan tergantung pada kondisi lokal dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti; budaya lokal, pendukung dan hubungan klien antara pemilik kapal dan awak kapal (Zein, 2009). Kegiatan analisis bagi hasil nelayan tonda di Kecamatan Padang Selatan Muara Kota Padang menggunakan sistem bagi hasil yaitu dengan cara menghitung nilai produksi dikurangi biaya operasional, perbekalan, dan lainnya. Sistem bagi hasil yang dibagi rata setelah dikurangi biaya operasional dari nilai penangkapan dalam satu kali trip antara nelayan buruh dengan pemilik kapal merupakan hubungan kerja sama yang

paling tepat di lakukan oleh nelayan anak buah kapal (ABK) dengan nelayan pemilik kapal di Muaro Kota Padang.

Gambar sistem bagi hasil bisa dilihat sebagai berikut:



Gambar 4. Sistem Bagi Hasil pada Nelayan Kapal Tonda di Muara Kota Padang

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa sistem pembagian hasil alat tangkap di Muara Kota Padang yaitu sebesar 50:50 dimana pemilik kapal 50% (Rp. 4.450.000,-) dari hasil bersih dan penggarap 50% (Rp. 4.450.000,-) dari hasil bersih, untuk besar penggarap dibagi dengan pembagian 20% (Rp. 1.780.200,-) untuk nakhoda kapal dan 30% (Rp. 2.670.300,-) untuk anak buah kapal (ABK). penangkap ikan (penggarap)

terdiri dari 4 orang anak buah kapal (ABK) dimana hasil bersih penjualan ikan cukup besar dengan rata-rata sebesar Rp. 8.901.000,- per trip, sehingga pemilik kapal (majikan) mendapatkan keuntungan yang lebih besar di bandingkan penggarap. Dengan demikian, sistem berbagi antara pemilik dengan penggarap tidak seimbang. Tetapi sistem pembagian hasil nelayan menurut pemerintah sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah UU No.16 Tahun 1964 dengan sistem pembagian hasilnya 40:60, 40% untuk pemilik kapal, 60% untuk nelayan menggunakan kapal motor, walaupun disini kebijakan yang dibuat oleh nelayan tonda di Muaro Kota Padang adalah 50:50 dengan pemilik kapal 50% dan 50% lagi untuk awak kapal. Ini bisa diartikan bahwa pendapatan antara pemilik kapal dengan awak kapal sudah setara.

Pembagian hasil nelayan tonda di Muara Kota Padang dengan nelayan tonda yang ada di Bungus kota Padang juga sama. Berdasarkan hasil penelitian (Zein, 2009) bahwa sistem bagi hasil nelayan tonda di Bungus yaitu pemilik kapal mendapatkan 50% dan awak kapalnya juga mendapatkan 50%.

Dikalangan ABK bagian 50% itu kemudian di bagi lagi dengan ketentuan, dibagi 4 bagian. Bagian yang lebih besar didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab, tugas dan tenaga dan pemikiran

yang dibebankan kepadanya. Bagian yang paling besar biasanya diperoleh oleh nahkoda yaitu 20% dari 50%, sedangkan sisanya adalah untuk ABK biasa, yaitu masing-masing mendapatkan per tiga bagian dari 30% antara lain 1 orang juru masak dan 2 orang ABK biasa. Namun bagi nahkoda, bonus akan diberikan oleh majikan jika dalam melaut mendapatkan ikan yang banyak atau hasil penjualan ikan lebih besar, maka majikan (pemilik kapal) akan memberikan bonus sebesar 10% dari 50% bagian untuk majikan (pemilik kapal).

Pendapatan Nelayan

Rata-rata hasil per trip penerimaan nelayan dalam pembagian hasil penangkapan perikanan tonda di Muara Kota Padang, yaitu penerimaan Keuntungan/R yang di dapatkan dari hasil biaya operasional TC (*total cost*) di kurangi dari biaya penerimaan total TR (*total revenue*) atau dari hasil kotor rata-rata sebesar Rp. 8.901.000,-, sedangkan pembagian hasil bersih untuk pemilik kapal (50%) rata-rata sebesar Rp. 4.450.500,-, dan untuk nahkoda kapal (20%) sebesar Rp. 1.780.200,-, sedangkan Anak Buah Kapal atau ABK (30%) rata-rata sebesar Rp. 2.670.300,-, dari penerimaan masing-masing ABK mendapatkan per tiga bagian rata-rata sebesar Rp. 890.011,-.

Menurut **Mulyadi (2005)**, pola bagi hasil juga akan mengurangi resiko bagi pemilik kapal serta menjaminkannya tidak memberi upah yang tidak sepadan bilamana hasil tangkapannya sedang buruk. Hal ini terjadi karena penghasilan nelayan yang tidak dapat ditentukan kepastiannya, tergantung dari jumlah ikan yang ditangkap dan hasil penjualan yang dilakukan (**Mulyadi, 2005 dalam Yunawati, 2008**).

Didalam Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan secara tegas menyatakan bahwa dalam satu usaha yang diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, untuk kegiatan perikanan laut, nelayan pekerja memperoleh sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari hasil bersih jika mereka menggunakan perahu layar, dan sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh persen) dari hasil bersih bila yang dipergunakan adalah perahu bermotor.

Hal ini berarti, bahwa pemilik modal hanya memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan bersih bila mereka menggunakan perahu layar, dan sebanyak-banyaknya 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan bersih bila mereka menggunakan perahu bermotor. Sedangkan untuk kegiatan perikanan darat, penggarap tambak memperoleh sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari

hasil bersih jika mereka mendapatkan ikan dari hasil pemeliharaan (budidaya), dan sekurang-kurangnya memperoleh 60% (enam puluh persen) dari hasil kotor bila penggarap tambak mendapatkan ikan dari hasil menangkap di alam atau liar (Pasal 3 UU No. 16 Tahun 1964).

Berdasarkan hasil penelitian di Muara Kota Padang analisis hasil alat tangkap yaitu sebesar 50:50 dengan 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk penggarap. Dan walaupun pembagian hasil ini tidak sesuai dengan UU. No 16 Tahun 1964 sebesar 60:40 dimana 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan, sistem pembagian hasil alat tangkap di Muara Kota Padang sudah bisa dikatakan baik karena sistem pembagian hasil yang ada ini menitik beratkan pembagian yang sama besar antara pemilik kapal dan juga para nelayan.

Dibandingkan dengan sistem pembagian hasil alat tangkap di Muara Angke Jakarta yang diteliti oleh **Tridoyo (2005)** yaitu 45:55 dengan 45% untuk pemilik kapal dan 55% untuk para nelayan. Sistem pembagian hasil di Muara Angke Jakarta sebenarnya juga tidak sesuai dengan peraturan UU. No 16 Tahun 1964 tetapi sistem pembagian hasil ini juga menitik beratkan pembagian hasil yang besar untuk para nelayan. Bisa dilihat antara pembagian hasil di Muara Kota Padang dan di Muara Angke Jakarta

bertujuan untuk mensejahterakan para nelayan.

Dan disini bisa dilihat bahwa, biaya bersama dan biaya perawatan kapal tonda sesuai dengan peraturan UU No. 16 Tahun 1964 yaitu biaya bersama ditanggung antara pemilik kapal dan nelayan penggarap baik itu hanya biaya uang rokok, bekal selama dilaut bahkan jaminan untuk keselamatan para nelayan penggarap, dan untuk biaya perawatan dan perbaikan kapal itu sepenuhnya adalah tanggung jawab pemilik kapal.

Dan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa sistem bagi hasil alat tangkap nelayan tonda di Muara Kota Padang sesuai dengan peraturan UU. No 16 Tahun 1964, bahwa biaya bersama seperti rokok, bekal selama dilaut, dan jaminan keselamatan para nelayan ditanggung bersama antara pemilik dan nelayan penggarap, dan untuk biaya perawatan dan perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik kapal. Dan untuk hasil bersih dibagi dengan 50% untuk pemilik kapal serta 50% untuk nelayan penggarap.

Dan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa sistem bagi hasil alat tangkap nelayan tonda di Muara Kota Padang sesuai dengan peraturan UU. No 16 Tahun 1964, bahwa biaya bersama seperti rokok, bekal selama dilaut, dan jaminan keselamatan para nelayan

ditanggung bersama antara pemilik dan nelayan penggarap, dan untuk biaya perawatan dan perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik kapal. Dan untuk hasil bersih dibagi dengan 50% untuk pemilik kapal serta 50% untuk nelayan penggarap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan, Kodya Padang, Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Analisis sistem bagi hasil perikanan dan pendapatan nelayan pemilik kapal tonda di Kecamatan Padang Selatan Muara Kota Padang menggunakan sistem bagi hasil yaitu dengan cara menghitung nilai produksi dikurangi biaya operasional, perbekalan ,dan lainnya. Perolehan pendapatan rata-rata tiap nelayan pancing tonda di Muara Kota Padang, Kodya Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam sekali penangkapan sebesar Rp. 20.552.533,- dan keuntungan bersihnya adalah rata-rata sebesar Rp 8.901.000,- dan hasil bersihnya dibagi dengan presentase pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK)

50:50 dengan pemilik kapal (50%) rata-rata sebesar Rp. 4.450.500,-.

2. Analisis bagi hasil perikanan dan pendapatan untuk nelayan penggarap/ABK kapal tonda sebesar (50%) sebesar Rp. 4.450.000,- dengan rincian; untuk nakhoda kapal sebesar (20%) rata-rata sebesar Rp. 1.780.200,-, sedangkan anak buah kapal/ABK (30%) rata-rata sebesar Rp. 2.670.300,-, di bagi 3 dari tiap masing-masing ABK, rata-rata sebesar Rp. 890.011,-.

Saran

Dalam kurun waktu 2-4 tahun terakhir usaha nelayan pancing tonda semakin berkurang bahkan yang dulunya memiliki puluhan kapal tonda sekarang ini hanya memiliki 4-6 kapal tonda. Perlunya peran pemerintah daerah setempat dalam hal pengenalan teknologi serta lembaga permodalan yang bersifat formal untuk memberi bantuan modal pada tiap kelompok nelayan tonda merujuk daripada modal investasi yang sangat besar, agar perolehan pendapatan dapat lebih ditingkatkan. Sistem pembagian hasil dengan 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk awak kapal agar tetap menjaga kesejahteraan awak kapal.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kelautan Perikanan Kota Padang, 2012. *Statistik Perikanan Kota Padang*, Sumatera Barat.

_____.2012. *Laporan Rekapitulasi kedatangan dan keberangkatan Kapal Perikanan Tahun 2012 Dinas Kelautan Perikanan Kota Padang*, Sumatera Barat.]

Lembaran Negara No. 97. 1964. Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang *Bagi Hasil Perikanan yang sampai saat ini masih berlaku*.

Muhartono, R. 2004. *Alternatif Pola Bagi Hasil Nelayan Gillnet di Muara Baru*, Jakarta Utara.

Mulyadi, S. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

PSKPL-IPB. 2002. *Evaluasi Sistem Pengupahan dan Bagi Hasil Usaha Penangkapan di Pantai Utara (Pantura)*. Bogor.

Sadono, S. 1997. *Makroekonomi Modern*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudaryanto, A. 2009. *Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah*. Semarang.

Tridoyo, K. 2005. *Bagi Hasil Perikanan*. Erlangga. Jakarta

Wijaya, H. 2011. *Hasil Tangkapan Mandidihang (Thunnus albacares, Bonnaterre 1788) Dengan Alat Tangkap Pancing Tonda dan Pengelolaannya di Pelabuhan ratu Sukabumi*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Indonesia. Depok

Yunawati, D. 2008. Analisis Pendapatan dan Sistem Pembagian Hasil Nelayan Bermotor <5 GT dan 5-9 GT. Medan. Sumatera Barat

Zein, A. 2009. *The Influence of Technological Change On Income and Social Structure In Artisanal*

Fisheries In Padang, Indonesia. [Disertasi]. Program Pascasarjana. Universitas Bremen. Germany.